



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

RENCANA KERJA TAHUNAN STASIUN PPMHKP TERNATE

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate (Stasiun PPMHKP Ternate) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” maka Stasiun PPMHKP Ternate menetapkan misi yaitu :

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik disetiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

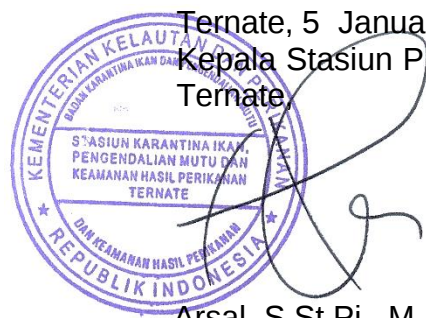
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PPMHKP Ternate Ternate Tahun 2026, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan /

sasaran strategisnya di tahun 2026. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Ternate untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2026 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Ternate sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2026. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Stasiun PPMHKP Ternate di tahun kedepannya.

Demikian RKT Stasiun PPMHKP Ternate Tahun 2026 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Ternate, 5 Januari 2026
Kepala Stasiun PPMHKP
Ternate



Arsal, S.St.Pi., M.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2026–2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BPPMHKP 2026 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Stasiun PPMHKP Ternate 2026-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen diatasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Perpres No. 02 Tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan BPPMHKP menjadi Perpres No. 38 Tahun 2023 dalam Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui *quality assurance*, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki aksestabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2026 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai Otoritas Kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Stasiun PPMHKP Ternate sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT Stasiun PPMHKP Ternate cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Ternate Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2026.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Stasiun PPMHKP Ternate pada tahun 2026.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2026 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Stasiun PPMHKP Ternate dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2026. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2026.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun PPMHKP Ternate adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Ternate Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM Stasiun PPMHKP Ternate tahun 2026 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun PPMHKP Ternate pada tahun 2026.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2026 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.

2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2026 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,

3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui:

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,
- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: “Mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan

strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BPPMHKP tahun 2026 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program- program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan- kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang BPPMHKP telah memperluas cakupan fungsinya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi BPPMHKP tahun 2026 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan

tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP
5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk

perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.

8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNB-PBPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNB berbasis digital.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2026- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Stasiun PPMHKP Ternate telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Stasiun PPMHKP Ternate telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Ternate TA 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	75
		5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (%)	70

		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	88
--	--	-----	---	----

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Stasiun PPMHKP Ternate Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Ternate TA 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Ternate	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	71,75

		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	3.5

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT. Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standard dan perkembangan iptek.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk

perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja Stasiun PPMHKP Ternate tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Stasiun PPMHKP Ternate tahun anggaran 2026 sebesar **Rp. 2.897.173.000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun PPMHKP Ternate untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun PPMHKP Ternate dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada Stasiun PPMHKP Ternate Ternate Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	117.524.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	85.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	2.694.649.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Ternate Tahun 2026		2.897.173.000

Rencana kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2026 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Stasiun PPMHKP Ternate antara lain :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan BPPMHKP Ternate pada tahun 2026 sebesar **Rp. 2.897.173.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Hasil kelautan dan Perikanan Sebesar **Rp. 2.694.649.000,-**
2. Manajemen Mutu sebesar **Rp. 85.000.000,-**
3. **Pengendalian** dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp. 117.649.000,-**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN TERNATE

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Arsal**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Ternate



Ditandatangani
Secara Elektronik

Arsal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN TERNATE

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Ternate	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	117.524.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	85.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	2.694.649.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Ternate Tahun 2026		2.897.173.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Ternate



Ditandatangani
Secara Elektronik

Arsal

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,897,173,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.13.EC 3989 3989.PDC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sertifikasi Produk[Base Line]	37.0 produk		202,524,000 117,524,000 71,375,000	
3989.PDC.002 051 A 521211 524111	Lokasi : KOTA TERNATE Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi Validasi produk pada sektor produksi pasca panen Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Belanja Bahan (KPPN.062-Ternate) - Konsumsi Percepatan Sertifikasi SPDI	37.0 produk 20.0 OK	 70,000	 1,400,000 1,400,000	U PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.062-Ternate) > Sertifikasi Uang Harian Inspeksi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) di Wilayah Maluku Utara [2 Orang x 3 Hari x 2 Lok] - Ikan (SPDI) di Wilayah Maluku Utara [2 Orang x 2 Hari x 2 Lok] Penginapan Inspeksi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) di Wilayah Maluku Utara [2 Orang x 2 Hari x 2 Lok] - Ikan (SPDI) di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 2 Lok] - Transportasi Inspeksi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 2 Lok] > FKP Percepatan SPDI Yogyakarta - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) - Transportasi Kegiatan FKP SPDI Yogyakarta PP	12.0 OH 8.0 OH 4.0 OK 4.0 OH 1.0 OH 1.0 OK	430,000 400,000 640,000 420,000 600,000 5,400,000	10,920,000 5,160,000 3,200,000 2,560,000 7,680,000 1,680,000 600,000 5,400,000	 SBM SBM
B 524111	Inspeksi dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.062-Ternate) Transportasi Inspeksi dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Kelayakan Proses (SKP) di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 4 kali] Uang Harian Inspeksi dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Kelayakan Proses (SKP) di Wilayah Maluku Utara [2 Orang x 2 Hari x 4 kali] Penginapan Inspeksi dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Kelayakan Proses (SKP) di Wilayah Maluku Utara [2 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	 8.0 OK 16.0 OK 8.0 OK	 561,905 430,000 250,000	13,375,000 13,375,000 4,495,000 6,880,000 2,000,000	PNP
C	Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)			29,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,897,173,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate)			29,000,000	RM
	> Sertifikasi HACCP			19,640,000	
	Uang Harian Inspeksi dalam Rangka Penerapan		430,000	10,320,000	
	- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di Wilayah Maluku Utara [2 Orang x 3 Hari x 4 Lok]	24.0 OH			
	Biaya Penginapan Inspeksi dalam Rangka Penerapan		400,000	6,400,000	
	- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di Wilayah Maluku Utara [2 Orang x 2 Hari x 4 Lok]	16.0 OH			
	Transportasi Inspeksi/Surveilan dalam Rangka		365,000	2,920,000	
	- Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 4 Lok]	8.0 OK			
	> Pembentukan Nomor Registrasi Inspektur Mutu			9,360,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali)	7.0 OH	480,000	3,360,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (B A L I)	1.0 OH	600,000	600,000	SBM
	- Transportasi Pembentukan Nomor Registrasi Inspektur Mutu (Bali)	1.0 OK	5,400,000	5,400,000	
D	<i>Penunjang Sertifikasi Mutu Pasca Panen</i>			9,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			9,000,000	PNP
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Belanja Bahan Uji Laboratorium	1.0 PKT	9,000,000	9,000,000	
3989.PDF	<u>Sertifikasi Lembaga[Base Line]</u>	14.0 Lembaga, Badan Usaha		40,149,000	
	Lokasi : KOTA TERNATE				
3989.PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	14.0 Lembaga		40,149,000	
051	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			40,149,000	U
A	<i>Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan</i>			22,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			22,000,000	RM
	(KPPN.062-Ternate)				
	Uang Harian Inspeksi Penerapan Sertifikat CBIB pada		430,000	10,320,000	
	- Pembudidayaan Ikan di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 3 hari x 4 Lok]	24.0 OH			
	Penginapan Inspeksi Penerapan Sertifikat CBIB pada		300,000	4,800,000	
	- Pembudidayaan Ikan di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 2 Hari x 4 Lok]	16.0 OH			
	Transportasi Inspeksi Penerapan Sertifikat CBIB pada		860,000	6,880,000	
	- Pembudidayaan Ikan di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 4 Lok]	8.0 OK			
B	<i>Sertifikasi CPIB pada Pembenihan</i>			2,649,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			2,649,000	RM
	(KPPN.062-Ternate)				
	Uang Harian Inspeksi Penerapan Sertifikat CPIB		430,000	1,290,000	
	- Pembenihan di Wilayah Maluku Utara [3 Org x 1 Hari x 1 Lok]	3.0 OH			
	Transportasi Inspeksi Penerapan Sertifikat CPIB		453,330	1,359,000	
	- Pembenihan di Wilayah Maluku Utara [3 Org x 1 kali x 1 Lok]	3.0 OK			
C	<i>Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan</i>			15,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,897,173,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.062-Ternate) - Penginapan Inspeksi Penerapan Sertifikat CPIB Kapal di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 1 Hari x 4 Lok] - Uang Harian Inspeksi Penerapan Sertifikat CPIB Kapal di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 2 Hr x 4 Lok] - Transportasi Inspeksi Penerapan Sertifikat CPIB Kapal di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 1 kali x 4 Lok]	8.0 OH 16.0 OH 8.0 OK	300,000 430,000 777,500	15,500,000 2,400,000 6,880,000 6,220,000	RM
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	2.0 Lembaga		6,000,000	
3989.QIC.002	Lokasi : KOTA TERNATE UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.0 Lembaga		5,000,000	
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			5,000,000	U
A	Evaluasi dalam Rangka Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan			5,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.062-Ternate) - Konsumsi Rapat Bulanan dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan [7 Org x 12 Kali]	84.0 OK	59,525	5,000,000	PNP
3989.QIC.003	unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	1.0 Lembaga		1,000,000	
051	unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan			1,000,000	U
A	Unit Produksi Primer yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			1,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.062-Ternate) - Bahan Penunjang Sertifikasi Primer	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	RM
7010	Manajemen Mutu			85,000,000	
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan		42,000,000	
7010.PBR.001	Lokasi : KOTA TERNATE Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		42,000,000	
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			42,000,000	U
A	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi SNI ISO/IEC 17020			36,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.062-Ternate) - Blaya Iuran Tahunan	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	PNP
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.062-Ternate) - Biaya Pendaftaran - Biaya Surveilan - Biaya Pertanggunggugatan	1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	5,000,000 14,000,000 1,500,000	5,000,000 14,000,000 1,500,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,897,173,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.062-Ternate)			14,000,000	PNP
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (MALUKU UTARA) [2 Org x 1 Hari]	2.0 OH	1,160,000	2,320,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara) [2 Org x 2 Hari]	4.0 OH	430,000	1,720,000	SBM
	- Transportasi Assessor PP [2 Org x 1 kali]	2.0 OK	4,980,000	9,960,000	
B	Pelatihan 17020			6,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.062-Ternate)			6,000,000	PNP
	- Transportasi Kegiatan Pelatihan 17020	1.0 PKT	6,000,000	6,000,000	
7010.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga		43,000,000	

7010.PDD.002	Lokasi : KOTA TERNATE Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		43,000,000	
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			43,000,000	U
A	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Pengujian SNI ISO/IEC 17025			43,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.062-Ternate)			1,500,000	PNP
	- Iuran Tahunan	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.062-Ternate)			29,000,000	PNP
	- Biaya Pendaftaran	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
	- Biaya Akreditasi 17025	1.0 PKT	14,000,000	14,000,000	
	- Biaya UP/Banding	1.0 PKT	10,000,000	10,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.062-Ternate)			12,500,000	PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara) [2 Org x 2 Hari]	4.0 OH	430,000	1,720,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (MALUKU UTARA) [2 org x 1 Hari]	2.0 OH	1,160,000	2,320,000	SBM
	- Transportasi Asessor Kegiatan 17025 [2 Org x 1 Kali]	2.0 OK	4,230,000	8,460,000	
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			2,694,649,000	
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			2,694,649,000	
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		2,694,649,000	

3987.EBA.962	Lokasi : KOTA TERNATE Layanan Umum	1.0 Layanan		221,160,000	
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			221,160,000	U
A	PENGELOLAAN RUMAH TANGGA			23,040,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,897,173,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate)			23,040,000	RM
	- Uang Harian Sinkronisasi Data Sakti [1 Orang x 4 Hari x 2 kali]	8.0 OH	480,000	3,840,000	
	- Transportasi Sinkronisasi Data Sakti [1 Orang x 2 Kali]	2.0 OK	8,000,000	16,000,000	
	- Penginapan Sinkronisasi Data Sakti [1 Orang x 2 Hari x 2 Kali]	4.0 OH	800,000	3,200,000	
B	<u>PENGLOLAAN UMUM</u>			62,808,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.062-Ternate)			5,200,000	RM
	- Member layanan aplikasi editing/olah data dan informasi	2.0 paket	2,600,000	5,200,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.062-Ternate)			16,728,000	RM
	- Belanja Bahan Penunjang Pelaporan LAKIP dan LAPTAH	1.0 pkt	1,200,000	1,200,000	
	- Snack Pelayanan	12.0 bln	200,000	2,400,000	
	- Cetak Sarana Data dan Informasi	1.0 Paket	7,360,000	7,360,000	
	- Belanja Bahan Penunjang Pelaporan Kinerja	1.0 PKT	468,000	468,000	
	- Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Layanan Pengaduan	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
	- Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Kearsipan	1.0 PKT	3,800,000	3,800,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate)			40,880,000	RM
	- Uang Harian Bimtek Kepegawaian [1 Orang x 4 Hari x 1 kali]	4.0 OH	480,000	1,920,000	
	- Transportasi Bimtek Kepegawaian [1 Orang x 1 Kali]	1.0 OK	8,000,000	8,000,000	
	- Penginapan Kegiatan Bimtek Kepegawaian [1 Orang x 2 Hari x 1 Kali]	2.0 OH	800,000	1,600,000	
	- Uang Harian Lokal Bimtek Kepegawaian [1 Orang x 3 Hari x 1 Kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Uang Harian Bimtek Data dan Informasi [1 Orang x 2 Hari x 1 kali]	2.0 OH	480,000	960,000	
	- Transportasi Bimtek Data dan Informasi [1 Orang x 1 Kali]	1.0 OK	8,000,000	8,000,000	
	- Penginapan Bimtek Data dan Informasi [1 Orang x 2 Hari x 1 Kali]	2.0 OH	800,000	1,600,000	
	- Uang Harian Lokal Bimtek Data dan Informasi [1 Orang x 3 Hari x 1 Kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Penginapan Koordinasi komunikasi dan konsultasi (K3) [1 org x 3 hari]	3.0 OK	500,000	1,500,000	
	- Uang Harian Koordinasi komunikasi dan konsultasi (K3) [1 org x 5 hari]	5.0 OK	480,000	2,400,000	
	- Transportasi Koordinasi komunikasi dan konsultasi (K3) [1 org x 2 kali]	2.0 OK	7,000,000	14,000,000	
C	<u>TATA LAKSANA KELEMBAGAAN</u>			36,960,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate)			36,960,000	RM
	- Biaya Penginapan Koordinasi Tata Laksana Kelembagaan [3 org x 3 hari]	9.0 OH	800,000	7,200,000	
	- Uang Harian Koordinasi Tata Laksana Kelembagaan [3 org x 4 hari]	12.0 OH	480,000	5,760,000	
	- Transportasi Koordinasi Tata Laksana Kelembagaan [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	8,000,000	24,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,897,173,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	TATA USAHA DAN KEARSIPAN			23,840,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			23,840,000	RM
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Penginapan Layanan Maintenance WBK [1 Orang x 3 Hari]	3.0 OH	800,000	2,400,000	
	- Uang Harian Layanan Maintenance WBK [1 Orang x 4 Hari]	4.0 OH	480,000	1,920,000	
	- Transportasi Layanan Maintenance WBK [1 Orang x 1 Kali]	1.0 OK	8,000,000	8,000,000	
	- Transportasi Bimtek Persuratan dan Arsiparis [1 Orang x 1 Kali]	1.0 OK	8,000,000	8,000,000	
	- Penginapan Bimtek Persuratan dan Arsiparis [1 Orang x 2 Hari x 0 Kali]	2.0 OH	800,000	1,600,000	
	- Uang Harian Bimtek Persuratan dan Arsiparis [1 Orang x 4 Hari x 0 Kali]	4.0 OH	480,000	1,920,000	
E	LAYANAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN			45,280,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			45,280,000	RM
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Penginapan Kegiatan Rencana Kerja Anggaran dan Rapat Koordinasi Teknis [2 Org x 3 Hari x 2 kali]	12.0 OH	800,000	9,600,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 Org x 4 hari x 2 Kali]	16.0 OH	530,000	8,480,000	SBM
	- Transportasi Kegiatan Rencana Kerja Anggaran dan Rapat Koordinasi Teknis [2 Org x 2 Kali]	4.0 OK	6,800,000	27,200,000	
F	LAYANAN KEUANGAN DAN UMUM			29,232,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			29,232,000	RM
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Penginapan Sinkronisasi Data SAKTI GLP dengan Eselon 1 [1 org x 4 hari x 2 Kali]	8.0 OH	700,000	5,600,000	
	- Uang Harian Sinkronisasi Data SAKTI GLP dengan Eselon 1 [1 org x 5 hari x 2 Kali]	10.0 OH	480,000	4,800,000	
	- Transportasi Sinkronisasi Data SAKTI GLP dengan Eselon 1 [2 Orang x 2 kali]	4.0 OK	4,708,000	18,832,000	
3987.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		2,473,489,000	
001	Gaji dan Tunjangan			1,651,220,000	U
A	GAJI DAN TUNJANGAN			752,389,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			224,933,000	RM
	(KPPN.062-Ternate)				
	- - Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	191,533,920	191,533,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	16,700,000	16,700,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)/THR	1.0 BLN	16,700,000	16,700,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			13,000	RM
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 THN	978	1,000	
	- - Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 14)/THR	1.0 BLN	978	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	10,760	11,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,897,173,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.062-Ternate)			23,223,000	RM
	- - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	19,889,000	19,889,000	
	- - Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 14)/THR	1.0 BLN	1,658,000	1,658,000	
	- - Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,676,000	1,676,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.062-Ternate)			7,556,000	RM
	- - Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	6,473,000	6,473,000	
	- - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	543,000	543,000	
	- - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)/THR	1.0 BLN	540,000	540,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.062-Ternate)			7,560,000	RM
	- - Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	6,480,000	6,480,000	
	- - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	540,000	540,000	
	- - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)/THR	1.0 BLN	540,000	540,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.062-Ternate)			10,500,000	RM
	- - Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	9,000,000	9,000,000	
	- - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	750,000	750,000	
	- - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)/THR	1.0 BLN	750,000	750,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.062-Ternate)			2,676,000	RM
	- - Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	2,676,000	2,676,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.062-Ternate)			18,249,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	18,249,000	18,249,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.062-Ternate)			34,229,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	34,229,000	34,229,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.062-Ternate)			3,450,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	3,090,000	3,090,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS Gaji Ke 13	1.0 BLN	180,000	180,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS Gaji Ke 14/THR	1.0 BLN	180,000	180,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.062-Ternate)			40,000,000	RM
	- Lembur Pegawai	1.0 THN	40,000,000	40,000,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.062-Ternate)			380,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kinerja PNS	1.0 THN	380,000,000	380,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649767)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 2,897,173,000	

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	GAJI dan TUNJANGAN PPPK			898,831,000	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK (KPPN.062-Ternate)			304,509,000	RM
	- Gaji Pokok PPPK / Gaji ke 13 / Gaji ke 14	1.0 THN	304,509,000	304,509,000	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK (KPPN.062-Ternate)			6,000	RM
	- Pembulatan Gaji PPPK / Gaji ke 13 / Gaji ke 14	1.0 THN	6,000	6,000	
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (KPPN.062-Ternate)			16,885,000	RM
	- Tunjangan Suami/Istri PPPK / Gaji ke 13 / Gaji ke 14	1.0 THN	16,885,000	16,885,000	
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK (KPPN.062-Ternate)			308,000	RM
	- Tunjangan Anak PPPK / Gaji ke 13 / Gaji ke 14	1.0 THN	308,000	308,000	
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (KPPN.062-Ternate)			1,000	RM
	- Tunjangan Fungsional PPPK / Gaji ke 13 / Gaji ke 14	1.0 THN	1,000	1,000	
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK (KPPN.062-Ternate)			8,112,000	RM
	- Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	8,112,000	8,112,000	
511628	Belanja Uang Makan PPPK (KPPN.062-Ternate)			50,000,000	RM
	- Uang Makan PPPK	1.0 THN	50,000,000	50,000,000	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK (KPPN.062-Ternate)			20,510,000	RM
	- Tunjangan Umum PPPK / Gaji ke 13 / gaji ke 14	1.0 THN	20,510,000	20,510,000	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK (KPPN.062-Ternate)			40,000,000	RM
	- Uang Lembur PPPK	1.0 THN	40,000,000	40,000,000	
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK (KPPN.062-Ternate)			458,500,000	RM
	- Tunjangan Khusus/Kinerja PPPK	1.0 THN	458,500,000	458,500,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			822,269,000	U
A	OPERASIONAL PERKANTORAN			579,791,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649767)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 2,897,173,000	

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.062-Ternate)			412,280,000	RM
	- Honor Tenaga Outsourcing Petugas Keamanan, Kebersihan, Pengemudi, [6 Orang x 12 Bln]	72.0 OB	4,485,000	322,920,000	
	- Biaya Perpanjangan STNK Roda4	3.0 UNIT	1,400,000	4,200,000	
	- Biaya Perpanjangan SNTK Roda2	9.0 UNIT	150,000	1,350,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	6,650,000	79,800,000	
	- Air Galon	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Gas Stasiun KIPM Ternate	6.0 BLN	335,000	2,010,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.062-Ternate)			2,000,000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat Dinas Pos	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.062-Ternate)			66,291,000	RM
	> PENGELOLA ANGGARAN			0	
	> PENGELOLA PNBP			2,400,000	
	- Honorarium Bendahara Penerimaan PNBP	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	> HONORARIUM PENGELOLA SAI			59,571,000	
	- Penanggungjawab	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Koordinator	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Anggota [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	150,000	5,400,000	
	>> PENGELOLA ANGGARAN			0	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	1,180,000	14,160,000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	12.0 OB	470,000	5,640,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	410,000	4,920,000	
	- Honorarium Staf Pengelola [6 ORG x 12 BLN]	72.0 OB	342,370	24,651,000	
	> PEJABAT PENGADAAN BJ, PEJABAT PENERIMA BJ, PENYIMPAN PENGURUS BMN			4,320,000	
	- Honorarium Pengurus Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	180,000	4,320,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.062-Ternate)			20,800,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Maluku Utara) [13 Orang x 2 stel]	26.0 STEL	800,000	20,800,000	SBM
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.062-Ternate)			66,000,000	RM
	- - Listrik Stasiun KIPM Ternate dan Lab	12.0 BLN	5,500,000	66,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.062-Ternate)			4,020,000	RM
	- - Telepon Stasiun KIPM Ternate	12.0 BLN	335,000	4,020,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.062-Ternate)			8,400,000	RM
	- - Air Stasiun KIPM Ternate dan Lab	12.0 BLN	700,000	8,400,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
 ALOKASI Rp. 2,897,173,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	SARANA PERKANTORAN			33,000,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.062-Ternate)			33,000,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor UPT	165.0 M2	200,000	33,000,000	
C	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			72,507,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.062-Ternate)			8,507,000	RM
	- Jamuan Tamu	1.0 THN	8,507,000	8,507,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.062-Ternate)			11,000,000	RM
	- Pas Kendaraan/Petugas Lingkup Bandara	1.0 THN	11,000,000	11,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.062-Ternate)			23,000,000	RM
	- Bahan Penunjang Sarana Pelayanan dan Peringatan Hari Besar Nasional	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
	- Bahan Penunjang Keperluan Sehari-hari Perkantoran [12 Bln]	12.0 Bln	1,500,000	18,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.062-Ternate)			30,000,000	RM
	- Keperluan Persediaan Sehari-hari Perkantoran	12.0 BLN	2,500,000	30,000,000	
D	OPERASIONAL PENGAWASAN			136,971,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.062-Ternate)			47,119,000	RM
	- Kalibrasi alat laboratorium dan Inspeksi	1.0 PKT	47,119,000	47,119,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.062-Ternate)			89,852,000	RM
	- Pemeliharaan Printer	13.0 UNIT	150,000	1,950,000	
	- pemeliharaan AC [15 Unit x 2 Kali]	30.0 UNIT	150,000	4,500,000	
	- Pemeliharaan Personal Computer/notebook/laptop	16.0 UNIT	200,000	3,200,000	
	- Pemeliharaan dan Operasional Genset	1.0 THN	2,500,000	2,500,000	
	- Perbaikan inventaris kantor	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Maluku Utara)	2.0 UNIT	30,000,000	60,000,000	SBM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Maluku Utara)	4.0 UNIT	3,675,500	14,702,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Ternate, 18 November 2025



ARSAL, S.St.Pi, M.P

NIP. 198105202003121005